

## **KONFLIK DAN DEPRIVASI RELATIF (Telaah Konflik Perumahan Taman Indah dan MTs Darussalam di Yogyakarta)**

**Ahmad Kholil**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*ak.kholilahmad@gmail.com*



### **Abstrak**

Siswa MTs Darussalam yang notabene terdiri dari masyarakat Kampung Kebonagung. Salah satu persoalan yang tengah dihadapi adalah sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengenyam pendidikan karena tidak ada akses untuk memasuki gedung sekolah unit II. Di lain sisi warga perumahan berkeberatan memberikan izin kepada pihak MTs untuk menggunakan jalan perumahan sebagai akses siswa-siswi. Nuansa agama tidak dapat dilepaskan pada kasus ini, selain karena antar kelompok sebagai aktor utama konflik terdiri dari mayoritas penganut agama Islam, lebih unik lagi berada di bawah komando organisasi masyarakat berbasis agama yang saman.

Hasil penelitian ini menunjukkan tentang fenomena deprivasi relatif di kampung Kebonagung yang bermuara pada konflik. Setidaknya terdapat tiga kondisi yang melatarbelakangi lahirnya deprivasi relatif pada kasus konflik warga perumahan dengan pihak MTs, yaitu interaksi sosial yang pasif, fenomena “*dual-society*” dalam ekonomi dan disfungsi agama. Deprivasi sosial tersebut muncul karena adanya kesenjangan atau perbedaan negatif antara nilai ekspektasi dan nilai

kapabilitas sehingga membuat pihak MTs dan warga perumahan frustrasi.

*Kata Kunci: Kampung Kebonagung, MTs Darussalam, Perumahan Taman Indah, Deprivasi Relatif, Konflik*

### Abstract

The Majority of students of Madrasah Tsanawiyah Darussalam is consisted of Kebonagung village . One of the problems being faced is the difficulty to get the basic needs for education activities because there is no access to enter the second unit of school building. Beside of that the resident of Taman Indah do not allow the housing road is used as an access for student to go to school. The nuances of religion can not be released in this case, because both of the groups as the main actors of the conflict that is consisted of the majority of adherents of Islam. Also the more uniquely both of groups are under the command of the same organization that based of the same religion.

The results of this study is to indicate the relative deprivation phenomenon in Kebonagung village which leads to conflict. There are three conditions that cause relative deprivation in the case of the conflict between Taman Indah Housing Residence and Madrasah Tsanawiyah Darussalam, *first* passive social interaction, *second*, the phenomenon of “dual-society” in the economy and *third*, religious dysfunction. The social deprivation arises because of a gap or negative difference between the expectation value and the capability value, making the Madrasah Tsanawiyah side and housing residents are frustrated.

*Key Words: Kebonagung village, M Ts Darussalam, Taman Indah Housing, Relative Deprivation, Conflict.*



## **PENDAHULUAN**

Konstruksi lapisan masyarakat dalam lingkup sosial dipengaruhi oleh berbagai proses seperti gagasan, nilai, norma, aktivitas sosial yang baik, benar dan berguna secara kelompok atau pun individu. Lapisan sosial seperti ini lebih lanjut dikenal dalam disiplin ilmu sosial sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial seringkali ditemukan pada masyarakat kota —masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan— dengan karakteristik masyarakat heterogen. Hal ini tidak sejalan dengan masyarakat desa yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai budaya leluhur dan cenderung homogen. Berbeda dengan wilayah kota dan desa, daerah pinggiran (pinggiran kota) sebagai wilayah masyarakat sosial seringkali mengalami peralihan dan perubahan dari sikap dan pandangan hidup tradisional ke arah proses modernisasi. Peralihan itu salah satunya disebabkan oleh fenomena masyarakat heterogen dan masyarakat homogen yang tinggal dalam satu wilayah.

Kota atau perkotaan sebagai wilayah tentu mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat, hal ini menimbulkan tingginya laju masyarakat pendatang yang tidak sedikit memilih untuk menetap. Hal ini berimbas pada wilayah pinggiran kota, pasalnya masyarakat pendatang dengan segala profesi di wilayah kota sering kali memilih untuk menetap di wilayah pinggiran karena dinilai masih memiliki tingkat kondusifitas yang lebih baik dari pada wilayah kota, kondisi alam yang masih hijau dan menawarkan mobilitas yang lebih rendah dari pada kota. Imbas pada wilayah pinggiran adalah bercampurnya dua karakteristik masyarakat homogen dan heterogen. Selain itu, teritori yang sangat berdekatan dengan perkotaan memungkinkan wilayah tersebut menjadi sasaran utama introduksi teknologi masyarakat industri atau modern sehingga berdampak pada arah perubahan sosial. Wilayah yang sedang mengalami masa peralihan

dan perubahan serta di dalamnya terdapat dua karakteristik masyarakat seperti demikian disebut sebagai masyarakat transisi (Nasution, 2009: 68).

Salah satu kecenderungan masyarakat pendatang di wilayah tertentu adalah dengan membentuk komoditas guna melekatkan nilai-nilai, ide, dan bahkan ideologi (Kitiarsa, 2008: 220). Komoditas yang paling menonjol bagi masyarakat pendatang adalah perumahan. Perumahan di perkotaan atau pinggiran secara umum didominasi oleh masyarakat pendatang, sekalipun demikian tidak semua masyarakat pendatang memilih perumahan, ada sebagian individu yang memilih untuk bermukim di luar perumahan yaitu berbaur dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, lahirlah kelompok-kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat pendatang dan kelompok masyarakat asli wilayah tersebut. Masyarakat pendatang dengan segala perbedaannya hadir di tengah-tengah masyarakat homogen yang masih berpegang teguh pada kaidah-kaidah budaya lokal dan cenderung menganut kesadaran kolektif oleh sebab kesadaran individu yang relatif lemah (Durkheim, 1984: 39). Dengan demikian, dimensi-dimensi sosial yang sebelumnya bersifat abstrak akan terlihat menonjol, seperti level ekonomi, profesi, budaya dan juga ideologi.

Diakui atau tidak, stereotip masyarakat umum terhadap masyarakat pendatang di suatu wilayah sangat tinggi khususnya yang bermukim di perumahan, seperti elitisme, individualis, level ekonomi dan pendidikan tinggi serta hal-hal lain yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat *modernist-casual*, berbeda dengan masyarakat asli yang notabene berpendidikan biasa dan bertaraf ekonomi menengah ke bawah bahkan rendah. Tampak stereotip seperti demikian diamini oleh masyarakat pendatang dengan sikap dan perilaku yang sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat, sehingga

secara tidak langsung klasifikasi akan terbangun. Di lain sisi, salah satu kecenderungan individu atau kelompok adalah menjadikan tolak ukur suatu objek yang dianggap mempunyai kondisi lebih baik dari pada mereka. Hadirnya masyarakat pendatang pun secara bertahap akan menggerus standar-standar kesadaran kolektif dan nilai harapan sebelumnya ke arah nilai-nilai baru yang lebih tinggi tanpa mengukur kemampuan diri. Jika hal ini terjadi level kelompok atau pun individu secara perlahan akan membaik, namun sebaliknya bila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka rasa frustrasi akan dialami seiring nilai-nilai baru yang dijadikan sebagai standar terus menanjak, fenomena seperti ini secara teoretis disebut sebagai deprivasi relatif.

Guna memfokuskan penelitian ini, peneliti akan mengambil salah satu objek yaitu wilayah Kampung Kebonagung, Kelurahan Babalan, Kecamatan Manding sebagai salah satu wilayah pinggiran kota Yogyakarta. Bercampurnya dua kelompok masyarakat di wilayah Kampung Kebonagung berdampak pada perubahan karakteristik masyarakat secara keseluruhan. Sebagian masyarakat pendatang Kebonagung bertempat di kompleks perumahan Taman Indah dan sebagian lain bercampur dengan masyarakat asli. Perumahan tersebut berdiri kurang lebih 26-27 tahun. Setiap individu yang datang dan tinggal di kompleks tersebut tentunya mempunyai perbedaan latar belakang sosial dan budaya sehingga karakteristik masyarakat tersebut bersifat heterogen. Berbeda dengan masyarakat asli yang telah menempati kampung itu secara turun temurun dan telah terbentuk kesadaran kolektif, sederhananya gotong royong. Tumpang tindih antara nilai tradisional yang melekat pada masyarakat asli dengan proses modern yang dibawa oleh warga pendatang mengakibatkan peralihan dari homogen ke masyarakat heterogen terus terjadi secara bertahap, baik di

level pendidikan, mata pencaharian dan kepercayaan. Pada level ini, masyarakat dituntut untuk menerima nilai-nilai modern dan meninggalkan nilai-nilai tradisi, di lain sisi masyarakat mempunyai kewajiban untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi yang dianggap positif untuk dikelola secara proporsional dan fungsional, seperti gotong royong dan tolong menolong (Nasution, 2009: 69).

Fenomena di lapangan memberikan pemahaman bahwa pendatang tidak hanya terletak di Kampung Kebonagung, tetapi juga kampung lain sekitar Kampung Kebonagung seperti Kebonsari dan tidak menutup kemungkinan frekuensi laju nilai-nilai modern pada masyarakat asli sangat tinggi. Terlebih pernyataan staff kelurahan bagian kewilayahan mengatakan bahwa statistik warga pendatang yang tinggal di kelurahan Babalan lebih tinggi daripada warga asli, termasuk di dalamnya Kampung Kebonagung. Menurut beliau, warga pendatang tidak harus tinggal di kompleks perumahan, ada banyak warga pendatang yang membeli tanah atau rumah di luar wilayah kompleks perumahan yang terdapat di kelurahan Babalan.

Pada level ini, ketegangan sosial dan perasaan frustrasi yang bermuara pada konflik sangat mungkin terjadi. Pasalnya, solidaritas sosial antar dua kelompok masyarakat berbeda karakteristik tidak mudah dibentuk. Bila konflik terjadi, sudah pasti akan menghalangi pemenuhan setidaknya satu atau empat poin kebutuhan dasar manusia yaitu keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas (Susan, 2009: 119). Jika salah satu dari empat kebutuhan dasar tersebut mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, munculnya konflik kekerasan ke permukaan akan terbuka lebar. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut bisa dijumpai oleh intensitas interaksi sosial antar warga, selain menghormati nilai-nilai tradisi dan mengutamakan kepentingan bersama.

Kampung Kebonagung sebagai objek penelitian kali ini beberapa waktu yang lalu dilanda oleh konflik yang secara garis besar melibatkan masyarakat pendatang dan masyarakat asli. Konflik tersebut secara spesifik disebabkan oleh terbenturnya keinginan pihak MTs untuk mendapatkan akses resmi sekolah dengan kebijakan masyarakat perumahan. Masyarakat asli Kebonagung terlibat dalam konflik tersebut karena adanya ikatan emosional dengan pihak MTs sehingga masyarakat tersebut memihak dan mendukung terhadap keinginan pihak MTs. Penelitian ini secara spesifik dimaksudkan untuk menemukan dua poin penting; 1) menemukan kronologi konflik sosial antara warga perumahan Taman Indah dan pihak MTs Darussalam, dan 2) menemukan konstruksi lahirnya deprivasi sosial pada konflik warga perumahan Taman Indah dan MTs Darussalam Kebonagung.

## **DEPRIVASI RELATIF**

Adalah ilmuwan Amerika, Ted Robert Gurr, yang merumuskan terjadinya kekerasan di picu oleh deprivasi relatif yang dialami oleh individu atau pun masyarakat. Dia merumuskan terjadinya deprivasi relatif sebagai akibat dari *“a discrepancy between the “ought” and the “is” of collective value satisfaction*”. *“Ought”* digunakan untuk menyatakan ekspektasi, sedangkan *“is”* digunakan untuk menyatakan masa kini atau fakta yang sedang terjadi. Gurr mendefinisikan deprivasi relatif sebagai persepsi individu atas jarak negatif antara nilai ekspektasi (*value expectations*) dan nilai kapabilitas (*value capabilities*). Nilai ekspektasi adalah harapan individu akan kualitas hidup tertentu yang dipercaya dirinya berhak untuk memiliki atau menikmatinya. Nilai kapabilitas adalah suatu kondisi di mana mereka percaya mampu untuk mencapai harapan tersebut (Gurr, 1971: 23-24). Dengan kata lain, deprivasi relatif dapat diartikan suatu kondisi atas anggapan

seseorang akan ketidakmungkinan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan oleh sebab ketidakberpihakan kenyataan, terlebih ketika mereka membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain yang dianggapnya lebih baik. Nilai (*value*) yang dimaksud oleh Gurr adalah kejadian, objek dan kondisi yang diperjuangkan oleh individu dan cenderung muncul oleh sebab beberapa fenomena, seperti pengalaman masa lalu, cita-cita abstrak, standar yang telah disepakati oleh kelompok tertentu (Dayaksini & Hudaniah, 2003: 205).

Runchimann mendefinisikan deprivasi relatif terjadi bila seseorang merasakan perbedaan antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang terjadi. Selaras dengan apa yang didefinisikan dua tokoh tersebut, Merton dan Kitt menjelaskan bahwa deprivasi relatif adalah perasaan yang muncul karena adanya ketimpangan akibat adanya ketaksesuaian antara harapan dengan apa yang diperoleh (Santhoso & Hakim, 2012: 123). Persepsi ini dapat terjadi secara personal ataupun kelompok. Namun demikian, deprivasi relatif pada seseorang tidak mempunyai hubungan dengan tindakan kolektif atas dasar deprivasi relatif kelompok. Deprivasi relatif secara personal cenderung mengarah pada upaya strategi peningkatan nilai pribadi, sedangkan deprivasi relatif secara kelompok cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan tidak didasarkan pada kepentingan individu dalam kelompok (Tougas & Beaton, 2002: 121).

Kenyataan akan tidak tercapainya keinginan atau harapan MTs Darussalam untuk menggunakan jalan Perumahan Taman Indah sebagai akses siswa memasuki gedung unit II menimbulkan persoalan yang pada awalnya bersifat tertutup. Pada kasus ini deprivasi relatif terjadi pada ranah kelompok yaitu pada kelompok MTs Darussalam, dalam hal ini kelompok tersebut merasakan



ketidakadilan atas hilangnya salah satu kebutuhan berlangsungnya proses belajar-mengajar, yaitu akses gedung sekolah. Di lain sisi, kelompok perumahan merasa menjadi korban fenomena deprivasi relatif pada kelompok MTs. Persoalan tersebut mencuat karena deprivasi relatif yang pada awalnya terjadi secara perorangan meluas dalam suatu kelompok sehingga keadaan menjadi tegang dan mudah tersulut, hal ini cenderung melahirkan konflik laten.

Terjadinya deprivasi sosial pada seseorang disebabkan oleh beberapa faktor, secara umum hal itu bisa terjadi karena adanya ketidakadilan sosial yang dialami oleh seseorang. Seperti yang dikatakan Runciman bahwa terdapat dua model deprivasi bila dilihat dari sifatnya. *Pertama*, deprivasi egoistikal yaitu terjadi ketika seseorang merasa kondisinya lebih buruk dibandingkan orang lain dalam satu kelompok. *Kedua*, deprivasi fraternal yaitu terjadi ketika seseorang menilai kondisi kelompoknya lebih buruk dibandingkan kelompok yang lain. Kedua model deprivasi itu dapat terjadi pada seseorang yang dinamakan *doubly deprived*, yaitu dua macam deprivasi yang dialami oleh seseorang (Faturachman, 1998: 6).

Gurr membedakan deprivasi menjadi tiga model. *Pertama*, *decremental deprivation* terjadi apa bila nilai-nilai harapan (*value expectations*) kelompok tidak berubah tetapi kemampuan (*value capabilities*) kelompok menurun. Keadaan seperti ini dirasakan berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa seseorang mendapatkan apa yang diinginkan, sedang pada kenyataan yang terjadi kemudian adalah kehilangan apa yang menurutnya dapat dicapai atau terpenuhi. Beragamnya kondisi nilai seperti depresi, resesi ekonomi akibat pemasukan yang berkurang, perasaan tidak aman, keterbatasan akibat pemberlakuan aturan kelompok lain, kemunduran pada sejumlah oportunitas yang tersedia merupakan penyebab timbulnya *decremental deprivation* (Gurr, 1971: 46).

*Kedua, aspirational deprivation* atau deprivasi aspirasional yang timbul akibat kemampuan kelompok yang tidak berubah sedangkan harapan kelompok meningkat. Pada konteks ini, seseorang tidak merasakan dan mengalami kehilangan melainkan timbulnya emosi akibat tidak memiliki alat atau sarana untuk mencapai komoditas tertentu yang sangat diharapkan, atau nilai baru yang sebelumnya tidak dimiliki, dapat berupa kelas sosial, pekerjaan yang diinginkan dan lain sebagainya. Selain itu, efek demonstratif juga berpengaruh pada akselerasi meningkatnya nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi seseorang atau kelompok dapat meningkat oleh sebab efek demonstratif individu atau kelompok lain yang sedang mengalami perkembangan dari pada individu atau kelompok itu sendiri (Gurr, 1971: 50-51).

*Ketiga, progressive deprivation* atau deprivasi progresif yang terjadi bila kedua unsur berubah, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok menurun sementara harapannya meningkat. Hal seperti ini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang mengalami sejumlah perubahan, baik secara personal ataupun kelompok. Seperti kasus pemecatan pada karyawan yang berstatus kepala keluarga, di satu sisi tanggungan kebutuhan keluarga semakin meningkat sedangkan di sisi lain kemampuan atau sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut menurun (Gurr, 1971: 53-54).

Secara umum dapat dipahami bahwa deprivasi relatif dialami seseorang karena adanya ketidakadilan sosial yang terjadi akibat kesenjangan antara nilai harapan (*values expectations*) dan nilai kemampuan (*values capabilities*), sehingga mengalami kehilangan dan ketidakpuasan. Adanya gerakan sosial atau tindakan masyarakat secara berkelompok muncul ketika merasa diabaikan atau diperlakukan tidak seleyaknya. Faturochman dalam penelitiannya (1998), bahwa deprivasi relatif lebih mudah dipahami dari *simtom* atau gejala

psikologis, karena pada dasarnya deprivasi relatif merupakan kondisi psikologi yang tidak menguntungkan (Faturochman, 1998: 7).

## **PEMBAHASAN**

Konflik yang terjadi pada konteks ini melibatkan antar warga perumahan Taman Indah dan pihak MTs Darussalam yang didukung oleh warga asli Kampung Kebonagung. Konflik bermula dari tidak adanya akses untuk memasuki gedung baru sekolah yang disebut dengan unit II, sedangkan gedung lama disebut unit I. Salah satu solusi yang paling memungkinkan bagi pihak MTs adalah menggunakan jalan perumahan yang secara teritori bersebelahan dengan unit II. Oleh sebab itu, Sukmawati sebagai kepala sekolah MTs Darussalam meminta permohonan izin akses kepada pihak perumahan, mengingat terdapat tembok perumahan yang berdiri tepat di antara jalan dan gerbang gedung unit II. Pertemuan antara Wildan Danarto selaku ketua RW 23 Perumahan Taman Indah dengan Sukmawati tidak langsung menuai keputusan. Menurut Wildan, pertemuan yang disertai dengan surat izin tersebut sifatnya bukan individu, melainkan kolektif. Oleh sebab itu, Wildan meminta waktu untuk berkoordinasi dengan seluruh warga perumahan guna mendiskusikan permohonan tersebut (Danarto, 30 Mei 2016). Permintaan izin penggunaan akses jalan Taman Indah oleh pihak sekolah bukan hal yang baru, upaya tersebut telah dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya dengan merimkan surat permohonan izin kepada pihak Perumahan.

Upaya izin akses melalui jalan perumahan mendapatkan respon keberatan dari pihak Perumahan, baik surat yang dikirimkan oleh kepala sekolah MTs terdahulu atau pertemuan yang dilakukan Sukmawati dan Wildan. Wildan memaparkan keputusan yang diambil adalah keputusan kolektif warga perumahan. Keputusan

tersebut dilalui dari pelbagai pertimbangan, salah satunya kekhawatiran warga akan terganggunya kondusifitas lingkungan perumahan, pasalnya pedagang kaki lima sering singgah di depan gerbang unit I, hal itu dimungkinkan akan terjadi juga di unit II.

Dalam upaya untuk mendapatkan izin akses jalan setelah pernyataan keberatan warga perumahan, Sukmawati mengirimkan surat permohonan mediasi yang ditujukan kepada Lurah Babalan. Tetapi pertemuan yang digelar di kelurahan dengan dimediasi oleh Hidayat selaku Lurah Babalan tidak merubah keputusan pihak perumahan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua RW 23 dan masing-masing ketua RT perumahan, pihak MTs, PDM, Muspika, Komite Sekolah, kepolisian, wakil koramil, dan Camat Manding. Pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang sama dilakukan di tingkat kecamatan. Sama seperti sebelumnya, pertemuan di tingkat kecamatan sampai tingkat kota belum juga mendapatkan titik temu (Hidayat, 17 Mei 2018).

Konflik terlihat saat pihak MTs sepenuhnya tidak dapat memasuki gedung unit II. Sebelumnya siswa dan guru menggunakan tanah warga Kampung Kebonsari sebagai akses. Tanah tersebut tidak lagi dapat digunakan karena dibangun rumah oleh pemiliknya pada 15 Desember 2015. Sementara itu, siswa telah memasuki masa-masa akhir liburan dan kembali aktif pada 4 Januari 2016 (Sukmawati, 30 Mei 2016). Pada Minggu malam, 3 Januari 2016 pihak MTs melakukan rapat untuk menggelar aksi damai yang direncanakan pada hari Senin jam 09.00 WIB. Aksi tersebut melibatkan para siswa, guru, PDM, Cabang, Ranting Muhammadiyah, warga Kebonagung dari RW 10-17 serta akan mengundang media. Aksi damai yang telah direncanakan urung dilakukan karena pagar yang berada di depan gerbang unit II dibongkar oleh Wali Kota Yogyakarta. pembongkaran tersebut dilakukan jam 05.00 WIB hari Senin,

tanggal 04 Januari 2016 oleh HS (Wali Kota Yogyakarta) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan dibongkarnya pagar perumahan, siswa dan tenaga pengajar dapat memasuki gedung unit II seperti biasanya. HS sendiri menuturkan akan menanggung kemungkinan kritik dan risiko yang akan terjadi (jogjatv.tv, 5 Mei 2017). Pada saat pembongkaran, warga perumahan tidak dapat berbuat banyak, di samping karena pembongkaran yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, media dan masyarakat umum banyak berkumpul di lokasi tersebut. Akibatnya, sebagian warga Perumahan Taman Indah melaporkan HS ke Polda D.I. Yogyakarta, yaitu oleh 'tim sembilan'. Tim sembilan merupakan kelompok yang dibentuk oleh warga perumahan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan terkait persoalan tersebut dan mengkoordinasikan hasil pertemuan dengan warga perumahan.

Banyak pihak yang tidak menyetujui atas dilaporkannya HS ke Polda D.I. Yogyakarta. Sehingga keadaan antara warga perumahan dan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat kampung Kebonagung semakin memanas. Menurut mereka, tindakan HS untuk membongkar pagar adalah demi kepentingan umum, dan agar tercapainya salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu pendidikan. Akibatnya, ungkapan-ungkapan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada pihak perumahan bermunculan, baik yang bernada kebencian atau ancaman. Ungkapan yang lebih tepatnya bersifat intimidasi tersebut datang dari warga asli Kampung, diantaranya "*Kur dalam ae, kok dadi ngene*" (Cuma Jalan, kok jadi begini) dan "*Perkoro ngene ae kok dadi masalah, kur dalam, yo wes, nek mati ra usah dikubur nang kene*" (Perkara seperti ini saja koka jadi masalah, Cuma jalan, ya sudah, kalau meninggal tidak usah dikubur di daerah pemakaman sini) (Hidayat, 17 Mei 2018). Bahkan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 terdapat media visual berupa

spanduk hitam dengan tulisan bahasa Jawa; “*Iki dudu dalanmu lho!! Gaweo dalanmu dewe wae!!*”, tulisan tersebut disambung dengan *hashtag*; #laporpolisimeneh, (Ini bukan jalanmu lho!! Buatlah jalanmu sendiri saja” #laporpolisilagi). Pada level ini, kondisi sosial yang tidak setabil dengan diwarnai ungkapan seperti demikian kepada seseorang atau kelompok berada pada ranah kekerasan langsung. Kekerasan langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Galtung tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga secara lisan yang pada umumnya menyerupai teror. Kekerasan fisik dan teror sama-sama dapat berefek pada traumatis individu atau kelompok terkait, puncaknya kekerasan verbal tersebut dapat menimbulkan kekerasan lain dari waktu-ke waktu. Pelaku atau aktor dari kekerasan langsung dapat dilakukan oleh personal atau kolektif di ruang lingkup sosial (Galtung, 1996: 31).

Konflik di atas tentu tidak luput dari kondisi sosial yang melingkupi masyarakat terkait. Kondisi sosial sangat berpengaruh pada realitas sosial di lingkungan masyarakat, baik itu destruktif atau pun konstruktif. Pada konteks ini, peneliti melihat adanya kehendak rasional MTs Darussalam yang tidak terpenuhi akibat kebijakan dari kelompok lain, sehingga nilai ekspektasi (*value expectation*) dan nilai kapabilitas (*value capabilities*) pihak MTs mengalami jarak negatif. Akibatnya deprivasi relatif muncul menjadi fenomena baru sebagai bangunan konflik di masyarakat tersebut. Setidaknya terdapat tiga bangunan konstruksi deprivasi relatif pada kasus konflik yang terjadi pada masyarakat Kebonagung warga perumahan Taman Indah dan pihak MTs Darussalam yang menimbulkan tekanan pada kesejahteraan sosial dan munculnya rasa ketidakadilan sosial yaitu pasifnya interaksi sosial, *dual society* dalam dimensi ekonomi, dan disfungsi agama. Interaksi sosial di wilayah terjadinya konflik secara eksplisit nampak biasa dan harmonis. Harmonis dalam pemahaman

beberapa pihak diartikan sebagai situasi yang berjalan dengan tidak adanya sebuah persoalan, namun pada pengertian yang lebih mendalam keharmonisan sosial dimaksudkan sebagai keadaan sosial yang stabil dengan solidaritas masyarakat yang baik. Solidaritas masyarakat yang utuh salah satunya didapat dari hasil interaksi sosial yang sehat dan dijalin secara kontinuitas tanpa didasari pelbagai kepentingan.

Salah satu syarat utama terjadinya interaksi sosial adalah bertemunya antar entitas baik secara langsung atau pun tidak langsung, seperti melalui media elektronik. Interaksi sosial dengan model interaksi sosiabilita pada warga perumahan Taman Indah dengan masyarakat Kebonagung sebagai pihak yang sangat mendukung MTs Darussalam pada kasus konflik akses jalan belum peneliti temukan pada kehidupan sehari-hari, termasuk juga dengan pihak MTs itu sendiri sebagai salah satu aktor konflik. Menurut penuturan penjaga angkringan di sekitar luar kompleks perumahan, hampir tidak pernah ditemukan warga perumahan Taman Indah yang beraktivitas di sekitar Kampung Kebonagung (S, 30 Mei 2016). Hal ini berbanding lurus dengan penuturan Wildan, hal itu dimungkinkan karena aktivitas warga perumahan kebanyakan di dalam rumah atau di luar kompleks perumahan seperti di kantor atau ditempat kerja. Ruang sosial yang sangat memungkinkan untuk bercampurnya warga perumahan dengan warga kampung adalah di masjid Perumahan. Setiap shalat jamaah dilaksanakan tampak beberapa individu dari luar perumahan yang ikut berjamaah, termasuk juga siswa MTs dan karyawan biasa. Namun sayangnya ruang sosial seperti ini sulit untuk melahirkan interaksi sosial sosiabilita. Pasalnya setelah melaksanakan shalat jamaah masing-masing individu kembali pada aktivitas masing-masing.

Sejauh ini, relasi warga perumahan Taman Indah dengan

pihak MTs dan masyarakat Kampung Kebonagung terjadi saat kondisi-kondisi formal. Interaksi yang terjadi dalam suatu forum pada umumnya tidak memisahkan bentuk dengan isi, lebih tepatnya bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan atas dasar individu atau pun kelompok (Beilharz, 2005: 329-330), salah satu contoh sederhana kegiatan formal yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut adalah *Ahad Legi*. Pemisahan antara bentuk dengan isi pada proses interaksi sejatinya dapat meningkatkan ikatan sosial. Interaksi semacam ini disebut sebagai sosiabilita atau interaksi murni yaitu interaksi yang dilakukan atas dasar interaksi itu sendiri, tidak didasarkan pada satu hal apa pun —masalah kepentingan seperti pekerjaan— yang melatarbelakangi terjadinya sebuah interaksi (Johnson, 1988: 259). Pasifnya interaksi sosial warga perumahan Taman Indah dan masyarakat Kebonagung merupakan salah satu gejala eksklusi sosial dalam masyarakat, yaitu keadaan di mana masyarakat tidak mempunyai ikatan sosial dan menurunnya partisipasi, akses, serta solidaritas antar sesama warga (Syahra, 2010, 7). Pada kasus seperti ini dibutuhkan lembaga penengah (baca: pemerintahan) yang dapat diterima dan dapat mengikat dua masyarakat berbeda kultur agar mempunyai loyalitas dalam kehidupan bersama.

Situasi lingkungan dengan relasi interaksi yang pasif antar warga seperti gambaran di atas merupakan salah satu gejala sosial yang tidak stabil. Sederhananya, pasifnya interaksi sosial antar individu atau kelompok masyarakat menghambat terjalinnya solidaritas dan kepedulian pada lingkungan sosial. Bila hal ini terjadi, sensitivitas dan fanatisme kelompok akan tumbuh dan melahirkan sikap acuh pada persoalan yang dihadapi kelompok lain. Sebaliknya, kelompok lain dengan persoalan yang dihadapi akan mengalami ketidakpuasan di satu sisi dan kecemburuan di sisi lain oleh karena



adanya perbandingan atas kelompoknya sendiri yang dianggap tidak baik. Fenomena seperti ini disebut oleh Runciman sebagai deprivasi fraternal (Noviasari & Utari, 2013: 7).

Gambaran tentang dimensi ekonomi di Kampung Kebonagung sejatinya tidak terlalu mencolok, pasalnya perekonomian masyarakat secara umum hampir merata baik di dalam atau di luar perumahan, kecuali di beberapa lokasi pemukiman warga yang masih mempresentasikan masyarakat dengan taraf ekonomi lemah. Hal itu tidaklah mencengangkan mengingat warga pendatang Kampung Kebonagung yang notabene mempunyai tingkat ekonomi lebih mapan juga dapat ditemukan di luar kompleks perumahan, mereka lebih memilih untuk bermukim di Kampung Kebonagung tanpa harus bertempat di wilayah kompleks perumahan. Mayoritas warga dengan tingkat ekonomi rendah adalah warga asli, terutama warga yang bermukim di sebelah barat Perumahan Taman Indah, pemandangan tersebut terlihat sangat mencolok.

Fenomena masyarakat bertaraf ekonomi lemah di lingkungan masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke atas dalam konteks ini, selain disebabkan oleh rendahnya pendidikan juga terjadi akibat menanjaknya laju warga pendatang dan melesatnya laju warga asli yang memilih untuk pindah dan menetap di wilayah lain. Oleh sebab itu, *dual-society* dalam wilayah ini terbilang samar. Untuk mengetahui hal tersebut perlu adanya pemetaan mendasar, salah satunya dengan mengklasifikasikan antara warga pendatang dan warga asli sebagai karakter warga Kampung Kebonagung. Dengan demikian, dua arah laju ekonomi di kampung tersebut akan jelas terlihat. Sejatinya, laju tingkat ekonomi rendah yang dialami warga asli tidak bersifat absolut, melainkan lebih kepada tingkat ekonomi rendah relatif. Tingkat ekonomi rendah yang bersifat relatif identik dengan pendapatan individu atau kelompok terkait, sehingga

bagaimana pun hal itu dapat dirubah dengan meningkatkan penghasilan yang diperoleh.

Hubungannya dengan sekolah MTs Darussalam Kebonagung adalah fakta siswa-siswi MTs mayoritas terdiri dari masyarakat Kampung Kebonagung berekonomi rendah dan sebagian lainnya merupakan anak asuh dari Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah di Kampung Margosari. Dimensi ekonomi yang dimiliki oleh dua jenis siswa tersebut terbilang jauh dari pada level ekonomi warga perumahan Taman Indah dan warga pendatang di luar wilayah kompleks perumahan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setempat dan didukung dengan lemahnya level ekonomi pada peserta didik MTs Darussalam, pihak sekolah mempunyai kebijakan tersendiri di antaranya tidak menghendaki wali murid untuk ikut berpartisipasi secara materi dalam proses pembangunan atau upaya pengembangan sekolah, termasuk pembangunan gedung sekolah unit II yang menjadi pokok persoalan oleh sebab tidak tersedianya akses jalan.

Pada level agama, Islam bukan satu-satunya agama yang dianut oleh masyarakat Kampung Kebonagung, sebagian kecil masyarakatnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Lima keyakinan tersebut ada dan hidup di lingkungan sosial masyarakat dengan dua karakteristik, sekalipun berbeda pada level jumlah penganut, hal itu bukan merupakan masalah penting karena persoalan atas nama agama sampai saat ini hampir tidak ditemukan dalam lingkungan sosial antar masyarakat di wilayah tersebut. Konflik antar warga perumahan Taman Indah dengan pihak MTs bila ditilik dari perspektif agama lebih condong pada konflik internal, di mana warga perumahan Taman Indah mayoritas menganut agama Islam begitu pula dengan pihak MTs yang juga berbasis agama Islam, terlebih secara garis besar berada dalam lingkup

organisasi keagamaan yang sama. Bila ditarik pada teori yang digagas oleh Durkheim, persoalan itu paling tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan agama, mengingat salah satu fungsi agama adalah mempersatukan setiap individu dalam komunitas moral sehingga dianggap mampu meningkatkan kepedulian dan solidaritas sosial satu sama lain (Durkheim, 1995: 371).

Disfungsi agama pada konteks ini bukan berarti agama menjadi pemantik atau pemicu terjadinya sebuah konflik seperti pada umumnya, melainkan agama tidak dapat berperan sebagai mana fungsi sosialnya di mana agama dapat meningkatkan kepedulian dan solidaritas antar individu sehingga kesadaran akan kepentingan bersama menjadi hal yang paling pokok. Agama seakan dipisahkan pada kasus ini sehingga agama tidak mampu memainkan peranannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, padahal salah satu peluang untuk menemukan solusi akan suatu persoalan adalah dengan menemukan kesamaan akan entitas yang berbeda, dalam hal ini agama. Dengan demikian, dimungkinkan kepentingan-kepentingan yang lebih personal dalam diri kelompok (*in group*) akan tergerus oleh sebab persoalan yang lebih besar yaitu kepentingan bersama, mengingat Kampung Kebonagung secara umum mayoritas Islam dan berada dalam garis struktur organisasi agama yang sama.

### **Deprivasi relatif pada warga Perumahan**

#### **Taman Indah dan warga kampung Kebonagung.**

Konflik antar warga Perumahan Taman Indah dengan pihak MTs Darussalam yang juga melibatkan masyarakat Kebonagung dilihat oleh peneliti sebagai akibat dari adanya deprivasi relatif, khususnya pada pihak MTs yang dapat diinterpretasikan sebagai kelompok yang mengalami ketidakpuasan sekaligus kelompok yang

memperjuangkan nilai ekspektasi mereka. Hilangnya akses untuk memasuki gedung unit II sebagai salah satu syarat untuk mencapai nilai kesejahteraan pada pihak MTs Darussalam sedikit banyak melahirkan rasa frustrasi, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar mereka untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Negosiasi berulang-ulang yang telah dilakukan untuk mendapatkan hak akses jalan perumahan merupakan upaya sosialisasi sekaligus oportunitas untuk memenuhi nilai kesejahteraan sehingga dapat menghindari agresi, seiring nilai ekspektasi kolektif yang terus mengalami perubahan ke arah yang lebih tinggi. Permohonan akses jalan yang tidak terpenuhi mempengaruhi sikap dan perilaku kelompok terkait untuk terus berupaya sampai keinginan tersebut terpenuhi. Kelompok ini beranggapan bahwa akses jalan yang diharapkan merupakan ekspektasi yang layak diperjuangkan, hal ini didasarkan pada kebutuhan manusia secara umum dan bukan kebutuhan individu semata. Sejatinya, proses sosialisasi mengajarkan individu untuk menghindari terjadinya ketegangan yang bersifat tidak menyenangkan, akan tetapi bila individu-individu tersebut tidak dapat mengatasi atau menghindari maka yang terjadi kemudian adalah agresi, hal ini terjadi karena setiap individu mempunyai disposisi bawaan untuk menyerang atau mengentaskan nilai dari suatu objek yang menjadi sumber dari ketidaknyamanan (Gurr, 1971: 23).

Kesenjangan antara keinginan untuk mendapatkan akses jalan dari selatan (jalan Perumahan Taman Indah) sebagai nilai ekspektasi (*value expectations*) dengan penolakan warga Perumahan Taman Indah secara umum sebagai salah satu nilai kapabilitas (*value capabilities*) yang terjadi pada pihak MTs menjadikan nilai kesejahteraan mereka terganggu sehingga mengalami deprivasi relatif. Deprivasi relatif pihak MTs lahir dari pengalaman sebelumnya

yang pernah dirasakan, yaitu di mana siswa dan guru masih mendapatkan akses untuk memasuki gedung sekolah unit II dengan menggunakan tanah milik warga yang berada di utara gedung. Di sisi lain, nilai kesejahteraan yang sudah terganggu atas dasar nilai aktualisasi yaitu tidak adanya akses oleh sebab dibangunnya tanah warga (yang dipergunakan sebagai akses jalan dari utara) belum berada pada titik frustrasi karena tanah tersebut belum ditutup. Hal itu melahirkan nilai ekspektasi untuk menopang kesejahteraan kolektif yaitu memiliki akses atau jalan resmi gedung unit II:

“Saya merasa harus mempunyai akses jalan resmi untuk masuk gedung unit II, karena tidak mungkin selamanya menggunakan tanah orang,” (Sukmawati, 30 Mei 2016).

Dengan tercapainya nilai ekspektasi tersebut, maka siswa dan guru tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan proses belajar mengajar di gedung unit II. Harapan atau keinginan untuk lebih mencapai pada nilai yang lebih baik dapat terjadi kepada semua individu atau kelompok dengan berbagai kondisi sosial, termasuk juga pihak MTs dan warga asli Kebonagung. Menurut Gurr ekspektasi untuk menjaga atau menyimpan nilai yang sudah dicapai secara umum dapat terjadi pada semua orang atau kelompok. Individu atau kelompok masyarakat juga cenderung memiliki ekspektasi terkait apa yang harus dimiliki atau dicapai di masa mendatang, yang biasanya bernilai lebih dari apa yang dimiliki saat ini. Oleh sebab itulah, menurutnya nilai ekspektasi mengacu pada kondisi saat ini atau pun masa mendatang.

Pada level ini, pihak MTs dan warga asli Kebonagung mengalami deprivasi relatif dengan pola deprivasi decremental yaitu ketika tanah milik warga yang berada di utara gedung unit II masih dapat digunakan sebagai akses memasuki gedung sekolah, kemampuan untuk membeli tanah sebagai akses menuju gedung

tidak mumpuni dan negosiasi untuk menjadikan jalan dari selatan masih berjalan tanpa adanya tekanan, dalam hal ini nilai ekspektasi dan nilai kapabilitas berjalan sejajar. Sekalipun pembangunan di tanah warga sebelah utara berlangsung tapi untuk sementara siswa masih dapat memasuki gedung unit II walaupun sempit. Di lain sisi, MTs tidak memiliki sumberdaya materi untuk dapat memenuhi nilai kapabilitas karena lemahnya ekonomi sehingga tidak dapat membeli tanah untuk dijadikan sebagai akses gedung unit II. Hal ini menjadikan apa yang disebut sebagai nilai kapabilitas mereka menurun dan menimbulkan jarak negatif dengan nilai ekspektasi, terlebih akses di sebelah utara akan segera ditutup oleh pemilik lahan untuk proses pembangunan selanjutnya. Deprivasi decremental yang dialami oleh pihak MTs mengakibatkan lahirnya kondisi rasa kehilangan akan sesuatu yang seharusnya dianggap dapat dan berhak mereka memiliki, yaitu akses gedung unit II. Pasalnya, menurut Gurr individu atau kelompok merasa lebih kecewa dan marah ketika merasakan kehilangan apa yang pernah dimiliki dari pada kehilangan harapan untuk mencapai apa yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Lebih jauh lagi, menurutnya deprivasi semacam ini sangat rentan terjadi pada masyarakat “tradisional” dan di segmen tradisional masyarakat transisi (Gurr, 1971: 50).

Deprivasi relatif yang terjadi pada kelompok warga Perumahan Taman Indah terjadi karena adanya tekanan pada nilai kapabilitas mereka. Harapan untuk tetap mempertahankan jalan perumahan sebagai fasilitas perumahan tanpa pengakuan khusus oleh kelompok lain seperti “akses resmi sekolah” yang mengalami gangguan akan menimbulkan jarak negatif antara nilai ekspektasi dan nilai kapabilitas warga. Sekalipun diakui oleh beberapa warga bahwa secara individu permohonan akses jalan dapat dipenuhi, tetapi pada ranah kolektif hal tersebut tidak dapat direalisasikan

karena adanya benturan dengan suara kolektif warga perumahan untuk tidak memenuhi permohonan tersebut. Tekanan yang terjadi pada nilai kapabilitas kolektif warga perumahan disebabkan oleh persepsi masyarakat umum dan beberapa media yang secara gamblang pemberitannya dituturkan oleh Bapak Wildan (Ketua RW 23 Perumahan Taman Indah) sangat menyudutkan warga perumahan. Hal tersebut menurutnya menimbulkan distorsi yang cukup signifikan pada kondisi sosial warga perumahan dan pihak MTs. Pemberitaan oleh beberapa media menurut Bapak Wildan berangkat dari satu perspektif saja dan mengabaikan perspektif lain terutama perspektif warga perumahan. Pada kondisi ini, warga perumahan mengalami rasa kekhawatiran akan kehilangan hal yang sudah pernah dirasakan sebelumnya. Bila hal ini diabaikan dampak selanjutnya yang paling memungkinkan adalah hilangnya rasa aman dan kondusifitas lingkungan. Sebagaimana nilai ekspektasi kolektif yang merujuk pada masa sekarang dan masa akan datang, begitu juga dengan nilai kapabilitas kolektif. Pada masa sekarang, nilai kapabilitas individu atau kelompok direpresentasikan oleh apa yang sudah dapat dicapai dan dirasakan. Sedangkan di masa depan, individu atau kelompok mempercayai bahwa kemampuan mereka, lingkungan sosial, atau kebijakan pemerintah adalah mendukung upaya untuk menjaga apa yang telah dicapai dan dirasakan dalam kurun waktu tertentu (Gurr, 1971: 27). Hal yang terjadi pada warga perumahan adalah tidak adanya dukungan dari pihak tertentu untuk mempertahankan apa yang telah dicapai dan dirasakan selama ini, sehingga nilai kapabilitas tersebut menurun dari pada nilai ekspektasi, pada level ini warga perumahan mengalami deprivasi decremental.

## **KESIMPULAN**

Media massa pada 4 Januari 2016 yang dipenuhi pemberitaan

konflik antar warga perumahan Taman Indah dengan pihak MTs Darussalam Kebonagung menunjukkan bahwa kota Yogyakarta dengan julukannya sebagai kota pendidikan masih mengalami persoalan atau konflik yang bersinggungan dengan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik diawali oleh hilangnya sarana kebutuhan dasar manusia dalam hal pendidikan dan ketidakmampuannya dalam upaya menemukan akses baru untuk memenuhi nilai kesejahteraan yang diharapkan.

Mencuatnya konflik ke permukaan disebabkan oleh dibongkarnya pagar atau tembok perumahan Taman Indah oleh HS (Wali Kota Yogyakarta), hal itu dikarenakan tidak adanya akses menuju gedung sekolah MTs Darussalam unit II. Akibatnya, Wali Kota Yogyakarta dilaporkan ke Polda DIY oleh sebagian warga perumahan Taman Indah. Bermula dari inisiatif pihak sekolah untuk menggunakan jalan perumahan Taman Indah sebagai akses resmi untuk memasuki gedung unit II. Negosiasi pihak MTs kepada warga perumahan Taman Indah selalu mengalami benturan dengan keberatan-keberatan warga perumahan Taman Indah, baik di level kelompok, kelurahan, kecamatan dan pemerintahan kota.

Konflik di atas dapat dikatakan sebagai agresi dari fenomena deprivasi sosial yang dialami oleh pihak MTs oleh sebab kesenjangan antara nilai ekspektasi dan nilai kapabilitas sehingga membuat pihak terkait frustrasi, terancamnya nilai kesejahteraan dan hilangnya nilai keadilan pada diri mereka. Nilai ekspektasi terletak pada harapan pihak MTs untuk mendapatkan akses resmi guna memasuki gedung sekolah unit II, sedangkan nilai kapabilitas dapat dilihat dari kemampuan pihak MTs itu sendiri dalam mengupayakan tercapainya harapan yang menurut setiap anggotanya berhak untuk diperjuangkan dan didapatkan. Pada level ini, hal yang paling berperan dalam lahirnya deprivasi sosial dalam pandangan peneliti



setidaknya ada tiga dimensi, yaitu; interaksi sosial yang pasif, fenomena “*dual-society*” dalam ekonomi, dan disfungsi agama.

Interaksi sosial warga perumahan Taman Indah dengan masyarakat Kampung Kebonagung secara umum tidak tergambar pada lingkungan hidup sosial kemasyarakatan. Hal ini, selain disebabkan oleh minimnya ruang publik yang dapat mempertemukan keduanya, salah satunya juga adalah tata ruang yang tidak mendukung terjadinya persentuhan antar kedua kelompok sehingga interaksi yang terjadi bersifat pasif. Sedangkan interaksi warga perumahan Taman Indah dengan pihak MTs terjadi dalam keadaan formal. Interaksi semacam ini dirasa sulit untuk membangun solidaritas antar kedua belah pihak.

Fenomena “*dual-society*” dalam ekonomi di Kampung Kebonagung secara umum tidak terlihat, namun akan teras berbeda ketika merujuk pada siswa-siswi MTs Darussalam yang berasal dari Kampung tersebut dan berada dalam level ekonomi rendah. Sedangkan disfungsi agama sebagai salah satu faktor konstruksi deprivasi sosial bukan berarti agama hadir sebagai pemicu konflik, melainkan agama tidak dapat memainkan fungsi utamanya sebagai pemersatu, mengingat masyarakat Kampung Kebonagung mayoritas Islam. Agama seakan-akan terpisah dari lingkup sosial masyarakat sehingga tidak mampu menyentuh persoalan sosial yang dihadapi masyarakat beragama di Kebonagung.



## BIBLIOGRAFI

- Beilharz, Peter. 2005. *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap pada Filofos Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dayakisni. Tri dan Hudaniah, 2003, *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press.
- Durkheim, Emile. 1984. *The Division of Labor in Society*. London: The Macmilan Press.
- Durkheim, Emile. 1995. *The Elementary Forms of the Religious Life*, translated by Karen E. Fields. New York: The Free Press.
- Faturochman. 1998. “Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan dan Kondisi Buruh Pabrik”, *Jurnal Psikologi*, no.2, 1-15.
- Galtung, Johan. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: SAGE Publications.
- Gurr, Ted Robert. 1971. *Why Men Rebel*. New Jersey: Princeton University Press.
- “HS: Saya Hanya Berupaya Agar Anak-Anak Bisa Ke Sekolah,” *Jogja TV*, t.t., diakses 05 Mei 2017, <http://jogjatv.tv/hs-saya-hanya-berupaya-agar-anak-anak-bisa-ke-sekolah/>.
- Johnson, Doyle Paul. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lwang. Jakarta: PT Gramedia.
- Kitiarsa, Pattana. 2008. *Religious Commodifications in Asia: Marketing Gods*. Routledge: London dan New York.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang: UMM Press.
- Noviasari, Wulan dan Sri Utari. 2013. “Perbedaan Deprivasi Relatif Fraternal antara Etnis Cina dan Etnis Jawa.” *Jurnal Talenta Psikologi*, vol. II, no. 1, Februari.
- Santhoso, Fauzan Heru dan Moh. Abdul Hakim. 2012. “Deprivasi

- Relatif dan Prasangka Antar Kelompok”, *Jurnal Psikologi*, vol. 39, no. 1, Juni.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahra, Rusydi. 2010. “Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan”, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi Khusus.
- Tougas, Francine dan Ann M. Beaton. 2002. “Personal and Group Relative Deprivation; Connecting the ‘I’ to the ‘We’”, dalam *Relative Deprivation; Specification, Development, and Integration*, ed. Iain Walker dan Heather J. Smith. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Wawancara dengan Bapak “S” Penjaga Angkringan yang berlokasi tidak jauh dari gerbang Kompleks Perumahan Taman Indah, 30 Mei 2016.
- Wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Lurah Babalan, Manding, Yogyakarta, di kantor Kelurahan, 17 Mei 2018.
- Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Kepala Sekolah MTs Darussalam Kebonagung di Kantor MTs Darussalam Kebonagung, 30 Mei 2016
- Wawancara dengan Wildan Danarto, Ketua RW 23 Kompleks Perumahan Taman Indah Kampung Kebonagung, di kediamannya, 30 Mei 2016.

